



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 64 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dan ketentuan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Peraturan... 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN.  


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disebut ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh daerah sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten Pidie Jaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Gampong adalah keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
6. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at islam.
7. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari Bupati/ Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten sebagai unsur pembantu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
13. Pengelolaan keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Gampong.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Gampong yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.

## Pasal 2

Tata cara penghitungan pembagian dan penetapan alokasi dana gampong (ADG) dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penghitungan alokasi dana gampong;
- b. penetapan rincian alokasi dana gampong;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran alokasi dana gampong;
- d. penggunaan alokasi dana gampong;
- e. pembinaan..

- e. pembinaan dan pengawasan alokasi dana gampong; dan
- f. sanksi.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA GAMPONG

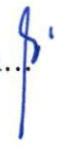
#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong; dan
  - b. kebutuhan operasional setiap Gampong lainnya.

#### Pasal 4

Penghitungan kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan acuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Keuchik per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);
- c. Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Ketertiban umum, Kaur Umum dan Perencanaan dan Kaur Keuangan Gampong per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Tunjangan Ketua Tuha Peut Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- e. Tunjangan Anggota Tuha Peut Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- f. Tunjangan Imum Meunasah Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- g. Tunjangan Bilal Meunasah Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

h. Tunjangan... 

- h. Tunjangan Kepala Dusun Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan
- i. Tunjangan Ketua Pemuda Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

### BAB III

#### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dari RKUD ke RKG dilaksanakan secara bertahap menurut kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Alokasi Dana Gampong dari RKUD ke RKG diatur dalam Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 7

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Gampong.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal...  
f.

### Pasal 8

Pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi qanun Gampong.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA GAMPONG

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana gampong dilakukan oleh SKPK terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

#### Pasal 11

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :

- a. merumuskan kebijakan tentang alokasi dana gampong dan pemanfaatannya;
- b. menentukan besarnya alokasi dana gampong berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang alokasi dana gampong;
- d. melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan alokasi dana gampong; dan
- e. mengkoordinasikan dengan institusi terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut.

### Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan alokasi dana gampong dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII

### SANKSI

### Pasal 13

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan alokasi dana gampong berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional Daerah (APIP) atau aparat penegak hukum lainnya, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 14

Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

- a. penundaan penyaluran alokasi dana gampong tahap selanjutnya; dan/atau
- b. penghentian penyaluran alokasi dana gampong tahap selanjutnya.

### Pasal 15

Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut dengan ketentuan:

- a. penyalahgunaan atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah diselesaikan secara hukum; dan
- b. keluarnya rekomendasi pencabutan sanksi dari aparat pengawas fungsional Daerah (APIP) atau aparat penegak hukum lainnya.

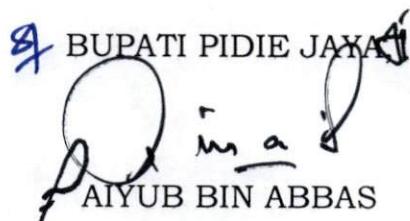
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 29 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awwal 1443 H

  
BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 29 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awwal 1443 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 64













